

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Ciruas berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya salah satunya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah atau masyarakat miskin. Dalam sila ke lima Pancasila menyebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut mempertegas bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama atas kehidupan yang layak terlebih pada masyarakat miskin. Masyarakat berhak atas kebutuhan dasar serta tempat tinggal yang layak sehingga dapat meminimalisir tingginya angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Ciruas. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum memperoleh kehidupan yang layak yang sesuai dengan taraf hidup semestinya.

Masalah kemiskinan di Kecamatan Ciruas terus menjadi permasalahan yang serius. Akibat dari permasalahan ini banyak anak-anak yang menjadi korban sehingga banyak yang harus putus sekolah karena terkendala dengan ekonomi. Banyak juga masyarakat dengan kondisi tempat tinggal yang sudah rusak dan tidak mampu

untuk memperbaikinya karena terkendala dengan biaya. Di Kecamatan Ciruas dalam menangani permasalahan kemiskinan sangat besar. Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini diperlukan suatu penanganan kemiskinan, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2019 tentang penanganan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Ciruas sendiri yang menaungi lima belas (15) desa terdapat beberapa bantuan di antara nya bantuan pangan non tunai (BPNT) dengan jumlah keluarga penerima bantuan sebanyak 1881 keluarga, bantuan keluarga harapan (PKH) dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1367 keluarga, dan bantuan bedah rumah dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 69 rumah yang terdapat di Desa Pulo, Singamerta, Kadikaran, Kepandean, Ciruas, dan Cigelam. Dari data 69 rumah tersebut yang mendapatkan bantuan bedah rumah sebanyak 10 rumah, namun berdasarkan hasil observasi yang di lakukan penulis, hanya 4 rumah yang di bedah dari data yang seharusnya mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut.

Dalam penanganan kemiskinan di Kecamatan Ciruas belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas mengenai penanganan kemiskinan di Kecamatan Ciruas yang terfokus pada bantuan bedah rumah di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten. Berdasarkan keterangan di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan (Studi Bantuan Bedah Rumah di Kecamatan Ciruas)”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Perda No. 5 Tahun 2019 tentang penanganan kemiskinan di Kecamatan Ciruas?
2. Bagaimana efektivitas penanganan kemiskinan bedah rumah di Kecamatan Ciruas?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi penanganan kemiskinan bedah rumah di Kecamatan Ciruas. Pembahasan ini dilakukan guna mengetahui penerepan

penanganan kemiskinan dalam mensejahterakan masyarakat Kecamatan Ciruas.

D. Tujuan Penelitian

Seiring dengan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda No. 5 Tahun 2019 tentang penanganan kemiskinan di Kecamatan Ciruas.
2. Untuk mengetahui efektivitas penanganan kemiskinan bedah rumah di Kecamatan Ciruas.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian akan sangat berguna apabila dapat memberikan manfaat bagi orang lain, lembaga, maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam mengatasi masalah penanganan kemiskinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kecamatan Ciruas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemerintah Kecamatan Ciruas dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam menangani kemiskinan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan bahan bagi penulis lanjutan, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penanganan kemiskinan.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi suatu media pembelajaran dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca serta menjadi sumber inspirasi untuk menangani kemiskinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada tahap ini, penulis mencantumkan penelitian milik orang lain yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis pada permasalahan yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Selain itu juga untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan yang masih berhubungan dengan

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dengan penelitian yang sudah ada.

Adapun penelitian atau karya ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

No	Nama Penulis/judul/perguruan tinggi/tahun	Substansi Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Marta Dwi Saputri/ Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Perspektif Maqasid Al-Syari'ah/ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2018.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Rastra yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 dinilai sejalan dengan konsep	Persamaan dengan penelitian penulis dalam hal bantuan penanganan kemiskinan sama-sama mengkaji tentang program yang dilakukan pemerintah	perbedaan dengan penelitian yang sudah ada lebih membahas dalam perspektif <i>Maqasid al-Syari'ah</i> terhadap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung. Sedangkan yang

		<i>Maqasid al-Syari'ah</i> sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. ¹	dalam mengatasi kemiskinan.	akan penulis teliti terfokus pada implementasi program pemerintah dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Ciruas.
2	Lia Amelia Rahman/ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pamekaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Pamekaran belum efektif, masih banyak fakir miskin	Persamaan dengan penelitian penulis, meninjau peran pemerintah dalam penanganan kemiskinan	Perbedaan dengan penelitian yang sudah ada penanganan kemiskinan lebih terfokus pada penanganan fakir miskin dan anak terlantar,

¹ Marta Dwi Saputri, "*Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Temanggung Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), diakses tanggal 12 Oktober 2021. (<http://digilib.uin.suka.ac.id>)

	<p>Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang)/ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung/2017.</p>	<p>dan anak terlantar belum mendapatkan hak nya yang sesuai dengan UUD 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) dan perda Kabupaten Karawang No. 02 Tahun 2014. Ditinjau dari perspektif Siyasa Dusturiyah keduanya menunjukkan kesesuaian dengan prinsip Siyasa Dusturiyah.²</p>	<p>berdasarkan peraturan daerah.</p>	<p>sedangkan yang akan penulis kaji terfokus pada bantuan sembako dan rehab rumah.</p>
--	--	--	--------------------------------------	--

² Lia Amelia Rahman, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang)", Universitas Sunan Gunung Djati Bandung (2017), diakses tanggal 12 Oktober 2021. (<http://digilib.uinsgd.ac.id>)

3	<p>Muhammad Badrudin Tamam/ Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2017.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin yang menduduki urutan kedua di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menangani masalah kemiskinan kabupaten Kulon Progo dinilai berhasil karena mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan kemiskinan tersebut</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis pada penanganan kemiskinan tersebut sama- sama mengkaji tentang peran pemerintah dalam menangani kemiskinan.</p>	<p>Perbedaan dengan peneliti penulis skripsi tersebut difokuskan pada strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengganggu kemiskinan dari segi ekonomi, sosial, pendidikan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan yang akan penulis teliti tertuju pada implementasi</p>
---	--	---	---	--

		<p>mencapai 11,73% yang semula dari 23,73% terhitung sejak 2011 hingga 2015. Penurunan tersebut akibat strategi pemerintah dari segi ekonomi, sosial dan pendidikan sehingga permasalahan kemiskinan dari tahu ke tahunnya mengalami penurunan yang nyata.³</p>		<p>peraturan daerah dalam menangani kemiskinan dalam hal bantuan sembako dan rehab rumah.</p>
--	--	--	--	---

³ Muhammad Badrudin Tamam, “*Strategi dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), diakses tanggal 12 Oktober 2021. (<http://digilib.uin-suka.ac.id>)

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis teliti dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis angkat berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dan hasil karya ilmiah yang sudah ada lebih membahas dengan di tinjau dari perspektif siyasah dusturiyah dan strategi pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, tetapi tidak membahas penerapan Perda tentang penanganan kemiskinan di Kecamatan Ciruas dan seberapa efektif penerapan penanganan kemiskinan bedah rumah yang terjadi di Kecamatan Ciruas.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam islam, konsep kemiskinan dikenal dengan kata *faqir* dan miskin. Kata *faqir* berasal dari kata *faquro – yafqoru - fuqiirun* yang berarti fakir.⁴ Kata *faqir* menunjukkan kepada orang yang tidak memiliki harta serta tidak mempunyai usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seolah-olah adalah orang yang menderita karena kefaqiran dalam hidupnya. Sedangkan kata miskin secara etimologis merupakan *ism masdar* yang berasal dari

⁴ Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 13, No. 1 (April 2017), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak, h. 72-73. (<https://jurnaliainpontianak.or.id/Almaslahah/article>) diakses Tanggal 21 November 2021, Pukul 08:01 WIB.

kata *sakana* – *yaskunu* – *sukuunan* yang berarti berhenti bergerak. Kata *sakana* – *sukun* memiliki arti diam, tetap, reda.⁵ Kata miskin menunjukkan kepada orang yang kekurangan secara ekonomi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata miskin dapat diartikan dengan orang yang tidak memiliki sesuatu sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang diam dalam kefaqiran. Dalam Al-Qur'an lafad *faqir* disebutkan dalam QS Al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (QS. At-Taubah [09]: 60).*⁶

⁵ Luknan Hakim, dkk, "Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3 (2020), Institut Agama Islam Negeri Curup, ISSN 2477-6157 E-ISSN 2579-6534, h. 2. (<https://jurnal.stie.ac.id/article>) diakses Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 10:15 WIB.

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung, 2013).

Selain ayat di atas lafad faqir juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang yang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 273).*⁷

⁷ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Bandung, 2013).

Sedangkan lafad miskin terdapat dalam QS. Al-Kahf ayat 79 yang berbunyi :

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya : *Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. (QS. Al-Kahf : 79)*⁸

Secara istilah, kata kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak mempunyai harta benda atau serba kekurangan.⁹ Sehingga kemiskinan dapat digambarkan ketidakmampuannya seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena kekurangan atau ketidak adaannya materi sehingga hidup dengan serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu tingkat kehidupan yang rendah yang terjadi pada sekelompok atau segolongan orang dibandingkan dengan tingkat kehidupan yang umum berlaku dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*

⁹ Yeni Salma Barlinti, "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *Lex Jurnalica*, Vol. 4, No. 3, (Agustus 2017), h. 159. (<https://ejurnal.esaunggul.ac.id>) diakses Tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 19:39 WIB.

Kemiskinan dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, tidak hanya kehidupan pribadi masyarakat yang miskin, namun juga kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemiskinan juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, diantaranya kualitas tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, pendidikan yang tidak merata, adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi dapat memicu munculnya tindakan kriminalisasi seperti aksi pencurian dan perampokan yang penyebab utamanya yaitu kemiskinan. Sehingga fakta-fakta kemiskinan ini dapat menjadi penguat bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus segera diatasi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan diantaranya:¹⁰

1. Pendidikan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang dalam keterampilan, sehingga keterbatasan keterampilan dan pendidikan ini menyebabkan seseorang sulit untuk masuk dalam dunia kerja.

¹⁰ Itang, "Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan" *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2015), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, h. 12. (<https://scholar.google.com>) diakses Tanggal 21 November 2021, Pukul 12.30 WIB.

2. Malas bekerja, sikap malas pada diri seseorang menyebabkan seseorang tersebut bersekap enggan atau acuh tak acuh dan tidak memiliki gairah dalam bekerja.
3. Terbatasnya lapangan kerja, hal ini menjadi pemicu kemiskinan karena keterbatasan lapangan kerja menjadi permasalahan utama yang membawa masyarakat dalam kemiskinan. Secara ideal nya seseorang dapat menciptakan lapangan pekerjaan tetapi hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan keterampilan dan modal.
4. Keterbatasan modal, hal ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi atau menerapkan keterampilan yang dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan karena keterbatasan modal.
5. Keluarga, anggota keluarga yang banyak yang tidak diimbangi dengan penghasilan dan pendapatan yang sesuai dapat menyebabkan kemiskinan karena semakin banyaknya kebutuhan atau beban yang meningkat untuk memenuhi kehidupan yang layak.

Dalam UU No.11 Tahun 2009, menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan seperti material, spritual dan sosial sebagai warga negara dan mendapatkan penghidupan yang layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Dalam penyelenggaraannya kesejahteraan sosial lebih di prioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, sehingga penyelenggaraannya lebih terarah dan berkelanjutan.

Islam mengajarkan umat nya untuk saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan serta meringankan beban antar sesama manusia. Islam juga mengajarkan untuk saling berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Rum ayat 38:

فَاعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka

itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-Rum [30]: 38).¹¹

Dari penjelasan ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang membantu sesama dalam kebaikan dan meringankan beban orang lain maupun orang terdekat, serta memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan maka orang tersebut akan dibalas kebaikannya serta menjadi orang yang beruntung. Sejalan dengan itu pemerintah berhak memberikan bantuan serta hak-hak yang seharusnya di dapat oleh para masyarakat miskin.

Pemerintah masih berupaya menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, upaya ini diharapkan dapat memperbaiki penghasilan melalui bantuan secara finansial yang bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi serta memelihara standar hidup minimal.¹² Dalam pelaksanaan menerapkan suatu peraturan diperlukan pemimpin yang adil, amanah, agar peraturan yang di terapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*

¹² Abd. Rohman, Antonuis Sukiman, dkk, "Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmiah Politik*, Vol. 3, No. 1 (Januari 2021), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribuwana Tunggaladewi, h. 73. (<https://ejournal.upm.ac.id>) diakses Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 13:05 WIB.

hal ini pemerintah harus adil dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar anggaran yang dikeluarkan dapat mengurangi angka kemiskinan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 59 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepada mu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa [04]: 58).*¹³

Disini peran pemerintah sangat di perlukan dalam mengatasi kemiskinan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu:

¹³ *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*

1. Penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
2. Bantuan perumahan yang mamadai untuk masyarakat miskin.
3. Bantuan uang tunai (BLT)
4. Bantuan bahan pangan seperti sembako.

Dalam merealisasikan upaya-upaya tersebut dibutuhkan anggaran dari negara yang di berikan kepada setiap daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dipegang oleh kepala daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan perancangan APBD yang salah satunya alokasi APBD terhadap penanganan kemiskinan.

Untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan diperlukan dana anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan kemiskinan. Dasar kegiatan pelaksanaan ini diperlukan persetujuan dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian ditetapkan

kedalam dokumen pelaksanaan anggaran daerah (DPA).¹⁴

Pada pelaksanaan program dana alokasi ini harus jelas dan tepat sasaran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu metode tentang langkah-langkah atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mempermudah suatu penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti.¹⁵ Pemilihan metode penelitian yang tepat dapat menjawab permasalahan dalam penelitian dengan baik. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati suatu masalah yang akan diteliti yang mengacu pada penerapan peraturan

¹⁴ Bonix Maulana dan Siti Muntayah, "Optimalisasi Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Melalui Model Kuadran Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 (2009) Universitas Muhammadiyah Kudus, h. 16. (<http://ejr.stikesmuhkudus.ac.id>) diakses Tanggal 14 Oktober 2021, Pukul 14:29 WIB.

¹⁵ Amri Amir, Junaidi, dkk., (ed.) *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (IPB Press, 2009) cetakan pertama, h. 115.

perundang-undangan dengan data yang diperoleh di lapangan.

b. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁶ Dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) untuk mengamati suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini meneliti langsung peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana mestinya. Untuk menganalisis data yang berasal dari buku ataupun hasil dari observasi lapangan yang kemudian di deskripsikan secara sistematis. Data yang berasal dari kepustakaan akan digunakan sebagai alat dalam menelaah implementasi peraturan daerah dalam menangani kemiskinan di Kecamatan Ciruas.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), cetakan ketigapuluh delapan, h. 4.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,..., h. 26.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid melalui pengamatan terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dibagi menjadi dua yaitu, observasi langsung dan observasi tidak langsung.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan observasi langsung. Penulis akan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga penulis dapat melakukan penelitian yang akurat.

2. Metode Interview

Metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang mengetahui masalah-masalah yang akan dibahas, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Kesejahteraan Kecamatan Ciruas, staf desa dan penerima bantuan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis fakta dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti : kondisi geografis, kondisi penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁸ Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis dan masalah yang diteliti. Sumber data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang dijadikan penelitian di lapangan yang berhadapan secara langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*,..., h. 157.

peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mengelola data. Sumber data primer pada penelitian ini adalah dari Kepala Kesejahteraan Sosial, staf desa, dan penerima bantuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap penjelasan data primer, data yang diperlukan dalam penelitian terdiri atas buku-buku, jurnal atau undang-undang yang membahas tentang penanganan kemiskinan.

5. Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang diuraikan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan pendapat para ahli yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, maka penulis membagi penulisan ini menjadi lima bab yang terdiri dari satu bab

sebagai pendahuluan, tidak ada bab sebagai pembahasan materi, dan satu bab terakhir sebagai penutup.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kondisi Objektif Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang , yang terdiri dari sejarah Ciruas, letak geografis, kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi keagamaan, kondisi kesehatan, kondisi perekonomian, kondisi sosial.

BAB III : Konsep Kemiskinan, yang terdiri dari teori implementasi, teori kemiskinan, konsep bantuan sosial, teori kesejahteraan sosial.

BAB IV : Perda Provinsi Banten No. 5 Tahun 2019 Tentang Penanganan Kemiskinan dan Implementasinya. Dalam bab ini penulis menguraikan dan menganalisis hasil dari penelitian lapangan dan wawancara terkait dengan implementasi Perda No. 5 Tahun 2019 di Kecamatan Ciruas, dan efektivitas penanganan kemiskinan pada bantuan bedah rumah.

BAB V : Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.